

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

Betapa mulia orang yang menuntut ilmu jika ditelaah dari petikan ayat Al Quran di atas. Allah Swt. tak segan-segan mengangkat derajat setinggi-tingginya kepada mereka yang *menasbihkan* diri terhadap keimanan kepadaNya, serta menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi jamninan bagi mereka. Di dunia mereka merasakan ketenteraman hidup karena segalanya telah dicukupi dengan ilmu syukur yang dimilikinya. Di akhirat akan selamat karena bekal dunia yang mencukupi untuk dituai di kehidupan baka kelak. Dunia ibarat ladang; persemaian melalui amal perbuatan mereka. Akhirat merupakan lahan panen mereka selama di dunia. Baik-buruk mereka di dunia menentukan nasib mereka, akankah menerima surga atau akan terjerumus ke dalam kubangan api neraka.

Selanjutnya tanggungjawab penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana keilmuan dalam hal ini pendidikan, dalam suatu negara, khususnya di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31. Ayat (1): Setiap warga negara berhak

¹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, PT. Karya Tohapatra: Semarang, tt, 234.

mendapat pendidikan, ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, ayat (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal-pasal ini menyebutkan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berlindung dari pasal 31 UUD 1945 tersebut, sangat relevan bila setiap warga negara menuntut haknya untuk mendapatkan pendidikan, khususnya bagi mereka, warga negara dengan ekonomi keluarga yang serba kurang berkecukupan.

Hal inilah yang menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Pemerintah dengan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sekitar 400 triliun rupiah (sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan; Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah peluncuran laporan ketimpangan oleh *Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development* di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Kamis, 23/2/2017).² Dana ini belum termasuk dana dari Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu, termasuk untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka melalui *Program Keluarga Harapan* (PKH).

Peran pemerintah menjadi sentral dalam hal ini. Mereka dituntut menjalankan kewajiban undang-undang dalam memberikan pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara; miskin-kaya, tua-muda, pribumi-nonpribumi. Melalui beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP),

² www.detik.com/finanace, diunduh pada tanggal 12 Februari 2017.

Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (*Rastra*); dahulu *Raskin* (Beras Miskin), Bantuan Langsung Sejahtera Mandiri (BLSM) diharapkan pendidikan berkualitas, kesehatan yang layak, dan kesejahteraan sosial dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat di seluruh penjuru negeri ini.

Nantinya program-program pemerintah terkait bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu melalui sistem satu pintu. Maksudnya, pemerintah berencana membuat satu kartu yang diberi nama Kartu Keluarga Sejahtera Himbara (KKS Himbara; Himpunan Bank-bank Negara) yang berfungsi sebagai media penyaluran bantuan. Melalui kartu tersebut, yang nantinya bisa dipergunakan sebagaimana kartu ATM (*Automatic Teller Machine*), bisa digunakan untuk transaksi di berbagai mesin ATM di seluruh pelosok Indonesia.

Kartu yang sekaligus sebagai ATM tersebut menampung bantuan PKH, KIP, KKS, Beras Sejahtera (*Rastra*) dan bantuan lain nantinya. Inilah yang dinamakan bantuan non tunai, penyaluran bantuan tidak lagi melalui tradisi uang *cash* yang langsung diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan pengalaman, bantuan tunai seperti ini sangat rawan terhadap penyelewengan, *pungli* (pungutan liar), dan berbagai permasalahan terkait ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat karena bantuan yang diterimanya tidak sesuai dengan nominal yang dijanjikan.

Terobosan yang dilakukan pemerintah, nantinya bantuan-bantuan seperti itu dapat dibarter dengan bahan makanan pokok melalui *e-warong* (Elektronik Warung Gotong Royong) yang nantinya akan tersebar di berbagai wilayah kecamatan di seluruh pelosok Indonesia. Dengan kerjasama dengan *Bulog* (Badan Urusan Logistik), *e-warong* dapat menyediakan sembako dengan harga terjangkau yang bisa dinikmati oleh keluarga penerima manfaat, cukup dengan menggesekkan kartu KKS Himbara nya melalui piranti *e-warong* sehingga transaksi jual-beli pun lebih efisien, tepat guna, dan gengsi mereka sebagai warga tidak mampu pun lama kelamaan akan memudar sehingga kesadaran mereka untuk segera terentaskan dari

kemiskinan bisa terfondasikan dimulai dari cara mereka bertransaksi jual-beli.

Peneliti mendedah PKH dalam menjalankan fungsinya dalam memperkuat akses pendidikan terutama partisipasi kehadiran peserta didik di sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan arti penting pendidikan demi masa depan anak. Melalui PKH diharapkan ada kesadaran, yang diawali dengan sedikit paksaan dari orang tua kepada anak untuk lebih rajin bersekolah guna mendapatkan kompensasi bantuan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali selama kurun waktu lima sampai delapan tahun berturut-turut.

Manajemen strategi yang melingkupi program andalan pemerintah menjadi fokus penelitian ini. Strategi apa yang menjadi andalan Kementerian Sosial melalui PKH membuat peneliti berusaha mendedah inovasi-inovasi yang dilakukan program ini dalam mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana slogan PKH yakni *Meraih Keluarga Sejahtera*, diharapkan kesejahteraan masyarakat penerimanya meningkat didukung dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan keluarga.

Manajemen strategik terkait Program Keluarga Harapan ini mengangkut tiga poin pokok yang berusaha peneliti korek melalui kegiatan penelitian yakni, formulasi, implementasi, dan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH). Ketiga-tiganya bersinergi menjadi sebuah manajemen strategi yang menopang pelaksanaan PKH guna mewujudkan tujuan besar PKH; mengentaskan kemiskinan, di samping tujuan lainnya yakni meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan dan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus pada penelitian kualitatif didasarkan pada studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat

sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.³ Peneliti akan mengembangkan penelitian nantinya setelah terjun di dalamnya atau bahkan mungkin membatasi penelitian sesuai sudut pandang peneliti meranah pada kondisi yang ditemukan di lapangan.

Peneliti memfokuskan penelitiannya pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di kecamatan Gajah khususnya di desa-desa yang bernaung di bawahnya yang meliputi 18 desa, yakni Desa Gajah, Desa Kedondong, Desa Jatisono, Desa Sambiroto, Desa Tlogopadogan, Desa Gedangalas, Desa Boyolali, Desa Banjarsari, Desa Mojosimo, Desa Sari, Desa Tambirejo, Desa Mlekgang, Desa Mlatiharjo, Desa Tanjungnyar, Desa Medini, Desa Wilalung, dan Desa Sambung. Selanjutnya fokus berlanjut pada sasaran PKH yang salah satunya adalah kepedulian keluarga terhadap pendidikan, peneliti mengerucutkan kembali kepada pendidikan Islam. Lingkup pendidikan Islam ini juga masih peneliti fokuskan kembali dalam Madrasah Aliyah (MA).

Pengerucutan kembali peneliti lakukan, di mana Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menjadi lokus riset. Di Kecamatan Gajah sendiri terdapat tiga unit Madrasah Aliyah di bawah koordinasi Kementerian Agama yakni, Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al Irsyad Gajah yang terletak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini Gajah di Desa Medini Gajah Demak, Madrasah Aliyah Tarbiyatul Muhtadin Wilalung Gajah yang berdiri di Desa Wilalung Gajah Demak.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sub bab sentral yang menjadi intisari dalam sebuah karya ilmiah. Di dalamnya tersurat bahan kajian pokok yang melingkupi seluruh isi karya yang bersangkutan. Agar masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik.⁴ Ikhtisar inti penelitian bisa dilihat dari permasalahan apa yang diangkat peneliti dalam mendedah tema besar yang mereka angkat.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Alfabeta: Bandung, 2012, hal. 396.

⁴ *Ibid*, hal. 396-397.

Penelitian tentang Analisis Manajemen Strategik Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial dalam Memberdayakan Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2017 ini memuat tiga rumusan permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana formulasi Program Keluarga Harapan dalam memberdayakan Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2017?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan bisa memberdayakan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2017?
3. Bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan bisa memberdayakan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2017?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan pada dasarnya menjawab permasalahan yang nihil (belum ada) data.⁵ Tujuan dari suatu permasalahan dalam penelitian pada hakikatnya mempermudah peneliti dalam memetakan akan penelitian ke depan. Poin apa yang menjadi maksud penelitian; akan dibawa ke mana penelitian pada langkah ke depannya. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang diketengahkan sehingga rencana peneliti dalam memecahkan masalahnya menjadi *goal* yang hendak dicapai dari penelitian yang dimaksud.

Terkait tujuan penelitian, peneliti memiliki tiga macam tujuan yang merupakan harapan yang hendak diidamkan setelah riset selesai dirampungkan, diantaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis formulasi Program Keluarga Harapan dalam memberdayakan Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2017?

⁵ Moh. Rosyid, *Bahasa Indonesia, Menuju Penggunaan Bahasa yang Baik dan Benar*, Idea Press: Yogyakarta, 2010, hal. 55.

2. Mengetahui dan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan bisa memberdayakan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2017?
3. Mengetahui dan menganalisis evaluasi Program Keluarga Harapan bisa memberdayakan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2017?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan adalah yang diangankan penulis dalam karyanya. Manfaat lazimnya dipilah manfaat teoritis (angan-angan akademik normatif) dan manfaat praktis aplikatif.⁶ Manfaat teoritis pada dasarnya mengarahkan pemanfaatan nyata dari teori-teori yang telah diutarakan menuju kemaslahatan akademik melalui penelitian. Adapun manfaat praktis lebih mengepankan aspek fisik pada subyek penelitian.

Beberapa manfaat penelitian kali ini sangat peneliti harapkan untuk teraplikasi menjadi bahan studi akademik yang berguna bagi masyarakat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan memperkaya acuan dan referensi tentang pendidikan Islam khususnya terkait peran pemerintah di dalamnya yakni memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibesut oleh Kementerian Sosial.

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat merumuskan berbagai temuan terkait dengan pemberdayaan pendidikan Islam yang dapat dijalankan melalui sutikan dana pemerintah melalui Program Keluarga Harapan di bidang pendidikan.fenomena pergeseran dakwah Islam melalui media televisi dalam meningkatkan pemahaman Islam di wilayah kecamatan Gajah kabupaten Demak. Secara spesifik, manfaat teoritis riset ini dapat dibedakan beberapa jenjang kemanfaatan, yakni bagi:

⁶ *Ibid*, hal. 55.

a. Peserta Didik

Peneliti mengharapkan sebuah kemanfaatan yang diterima oleh peserta didik, diantaranya:

- 1) Menambah motivasi akan sadarnya pendidikan peserta didik;
- 2) Mengetahui alur bantuan PKH dan kemanfaatannya;
- 3) Mempertebal semangat belajar dalam meraih impian dan cita-citanya.

b. Madrasah

Madrasah juga diharapkan bisa mengambil sedikit manfaat dari riset yang peneliti lakukan. Adapun manfaat tersebut diantaranya:

- 1) Memberikan gambaran detail tentang manajemen strategik PKH Kemensos RI;
- 2) Melalui peserta didik penerima PKH yang aktif , mendorong peningkatan kualitas madrasah.

c. Kementerian Sosial

Manfaat yang dirasakan oleh kementerian social diharapkan setelah publishnya riset ini:

- 1) Menjadi sarana pembenahan jika ternyata ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan skema yang ditentukan;
- 2) Meningkatkan dan menguatkan manajemen program agar lebih berpihak pada masyarakat.

d. Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan sederhana bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema besar PKH sehingga dapat menjadi sedikit pelita data yang sedikit banyak membantu kelengkapan penelitian yang dibutuhkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dimaksudkan sebagai gambaran umum tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan Tesis serta untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang hendak dikaji, maka disusun

sistematika berikut; bagian awal, pada bagian ini dimuat Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Abstrak, Halaman Pernyataan Keaslian Tesis, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Halaman Daftar Isi dan Halaman Daftar Tabel.

Peneliti memulai Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan landasan teori yang menguraikan teori manajemen strategik Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI dalam memberdayakan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Tahun 2017.

Adapun pada Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, sumber data, metode dan tehnik pengumpulan data serta tehnik pengolahan, uji keabsahan data dan analisis data.

Bab IV merupakan data dan analisis, terdiri dari gambaran analisis manajemen strategik Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI dalam memberdayakan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah se Kecamatan Gajah Tahun 2017. Bab V merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan, rekomendasi dan penutup, kemudian dilanjutkan dengan lampiran-lampiran pendukung.